

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Kamis, 11 Juli 2019



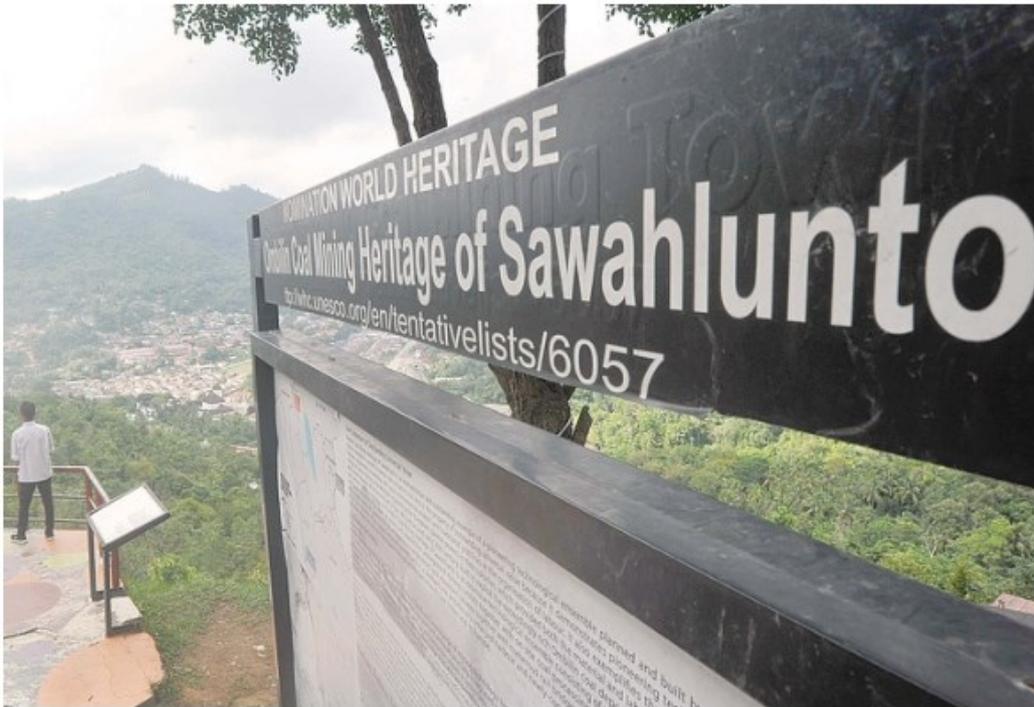
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Republika (Halaman 5)	Kamis, 11 Juli 2019	Berita Foto	Pemkot Sawahlunto akan melengkapi infrastruktur penunjang pariwisata, menyusul ditetapkannya situs tambang batubara Ombilin di kota itu sebagai warisan dunia oleh UNESCO.
2	Republika (Halaman 23)	Kamis, 11 Juli 2019	Ambruknya Tol BORR Diselidiki	PT Marga Sarana Jabar (PT MSJ) menginstruksikan PT Pembangunan Perumahan (PT PP) untuk menghentikan sementara pembangunan jalan Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) Seksi III A.
3	Media Indonesia (Halaman 2)	Kamis, 11 Juli 2019	Labuan Bajo akan Jadi Destinasi Wisata Premium	Presiden Joko Widodo menyatakan segmentasi pariwisata di Labuan Bajo, NTB, akan difokuskan untuk kelas premium.
4	Media Indonesia (Halaman 8)	Kamis, 11 Juli 2019	Berita Foto	Sejumlah pekerja membersihkan material di lokasi ambruknya salah satu tiang penyangga proyek Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) Seksi III A Simpang Yasmin-Semplak di jalan KH Sholeh Iskandar, kemarin.
5	Media Indonesia (Halaman 13)	Kamis, 11 Juli 2019	Berita Foto	Kementerian PUPR akan melakukan sinergi bersama pemangku kepentingan terkait untuk percepatan sertifikasi secara masif sebanyak 212.000 pekerja konstruksi di 2019.
6	Kompas (Halaman 10)	Kamis, 11 Juli 2019	Konsep "Forest City" Jadi Acuan	Ibukota baru yang akan dibangun di Kalimantan memakai konsep forest city. Kota itu dirancang untuk menampung sekitar 1,5 juta orang dan menjadi pusat pertumbuhan baru.
7	Kompas (Halaman 11)	Kamis, 11 Juli 2019	Berita Foto	Pemerintah Provinsi NTT sedang membangun infrastruktur di Sumba Timur untuk mengurangi daerah terisolasi di pesisir selatan.
8	Kompas (Halaman 15)	Kamis, 11 Juli 2019	Kendala Tol di Kaltim Teratasi	Proyek Tol Balikpapan-Samarinda ditargetkan beroperasi secara fungsional pada akhir 2019.
9	Kompas (Halaman 16)	Kamis, 11 Juli 2019	Kawasan Labuan Bajo Terus Ditata	Pemerintah pusat dan daerah terus menata kawasan Labuan Bajo menjadi kawasan pariwisata terpadu untuk kelas menengah atas.
10	Koran Tempo (Halaman 6)	Kamis, 11 Juli 2019	Berita Foto	Presiden Joko Widodo meninjau Puncak Waringin saat melakukan kunjungan kerja di Labuan Bajo, NTT, kemarin.
11	Koran Tempo (Halaman 20)	Kamis, 11 Juli 2019	Jasa Marga Siap Terapkan Satu Arah di Jalan Tol Cikampek	PT Jasa Marga siap menerapkan sistem satu arah di jalan tol Jakarta-Cikampek jika kepadatan lalu lintas benar-benar terjadi.
12	Bisnis Indonesia (Halaman 1)	Kamis, 11 Juli 2019	Berita Foto	Pemerintah berencana mempercepat pembangunan bandara di Labuan Bajo sesuai dengan rencana untuk menjadi bagian dari 10 Bali Baru.
13	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Kamis, 11 Juli 2019	Berita Foto	Penyelesaian tol Kunciran-Bandara terus dikebut dengan target merampungkan pembebasan lahan hingga akhir Juli 2019.
14	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Kamis, 11 Juli 2019	Lagi-Lagi Ambruk di Proyek Tol	Tidak dipungkiri, proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia berjalan secara masif, salah satunya adalah pembangunan jalan tol.
15	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Kamis, 11 Juli 2019	Berita Foto	Pekerja mengoperasikan ekskavator untuk melakukan pengerukan lumpur di Waduk Pluit, Jakarta, Selasa.
16	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Kamis, 11 Juli 2019	27 Lapak Liar di GT Surgem Dipindah	Jasa Marga Cabang Suragabay-Gempol bersama pihak berwenang lainnya menertibkan sebanyak 27 bangunan lapak liar di akses keluar Gerbang Tol Banyu Urip Jalan Tol Surabaya-Gempol pada

				Km 5+600.
17	Bisnis Indonesia (Halaman 23)	Kamis, 11 Juli 2019	RUU Pertanahan Tuntas September	Rancangan RUU Pertanahan yang masuk dalam program Legislasi Nasional ditargetkan tuntas pada September 2019.
18	Bisnis Indonesia (Halaman 23)	Kamis, 11 Juli 2019	Berita Foto	Kementerian PUPR akan melakukan sinergi bersama pemangku kepentingan terkait untuk percepatan sertifikasi secara masif sebanyak 212.000 pekerja konstruksi di 2019.

Judul	Berita Foto	Tanggal	Kamis, 11 Juli 2019
Media	Republika (Halaman 5)		
Resume	Pemkot Sawahlunto akan melengkapi infrastruktur penunjang pariwisata, menyusul ditetapkannya situs tambang batubara Ombilin di kota itu sebagai warisan dunia oleh UNESCO.		



WARISAN BUDAYA

Pengunjung menikmati panorama Kota Tambang Sawahlunto, Sumatra Barat, Rabu (10/7). Pemkot Sawahlunto akan melengkapi infrastruktur penunjang pariwisata, menyusul ditetapkannya situs tambang batubara Ombilin di kota itu sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO.

Judul	Ambruknya Tol BORR Diselidiki	Tanggal	Kamis, 11 Juli 2019
Media	Republika (Halaman 23)		
Resume	PT Marga Sarana Jabar (PT MSJ) menginstruksikan PT Pembangunan Perumahan (PT PP) untuk menghentikan sementara pembangunan jalan Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) Seksi III A.		

Ambruknya Tiang Tol BORR Diselidiki

BOGOR — PT Marga Sarana Jabar (PT MSJ) menginstruksikan PT Pembangunan Perumahan (PT PP) untuk menghentikan sementara pembangunan jalan Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) Seksi III A. Hal itu dipicu ambruknya kepala tiang pancar (*pier head*) ketika proses pengecoran terjadi pada Rabu (10/7) sekitar pukul 05.15 WIB. Insiden itu menyebabkan dua pekerja PT PP, yaitu Acil (25 tahun) dan Hanif (25) dirawat di Rumah Sakit Hermina Kota Bogor.

Direktur utama PT MSJ Hendro Atmojo mengatakan, insiden tersebut disebabkan jatuhnya balok penyangga cetakan *pier head* saat pengecoran ke-22 truk pengaduk semen dari total 25 truk. Pihaknya belum bisa memastikan apakah hal tersebut disebabkan oleh *human error* atau faktor lainnya.

Dia menegaskan, masih menunggu evaluasi dari tim Komite Keselamatan Konstruksi (K2) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hendro menambahkan, saat proses pengecoran beton berjalan, balok penyangga *formwork* tidak kuat, sehingga melengkung dan mengakibatkan beton tumpah ke jalan arteri di bawahnya.

"Komite Keselamatan Konstruksi (K2) datang dan mereka melihat secara teknis apa yang terjadi," ujar Hendro, Rabu.

Dia mengaku, sudah memerintahkan PT PP untuk menghentikan seluruh kegiatan proyek sejak insiden itu terjadi. Proyek berhenti hingga hasil penyelidikan lebih lanjut dari Komite K2 untuk menemukan kejelasan apakah proyek aman dilanjutkan atau tidak. Menurut Hendro, proses pemeriksaan di lokasi akan diselesaikan dua hingga tiga hari kerja.

Dia menuturkan, rekayasa lalu lintas dilakukan dengan kerja sama berbagai pihak, di mana arah menuju Parung dialihkan ke Simpang Yasmin lalu ke Simpang Semplak atau Atang Sanjaya. Hendro menambahkan, hal serupa dilakukan untuk jalur sebaliknya. "Siang hari, arus lalu lintas dapat berfungsi normal kembali," ucap Hendro.

Proyek Tol BORR kini hanya tinggal menyisakan dua sesi, yaitu III A dan III B. Proyek dengan panjang 2,85 km tersebut ditargetkan selesai dalam waktu pengerjaan 12 bulan hingga Desember 2019. Namun, dalam pelaksanaannya, proyek tersebut mengalami ambruk yang lokasinya berada di Simpang Yasmin-Simpang Semplak, arah menuju Parung, tepatnya di *pier* 10 depan Perumahan Taman Sari Persada, Kota Bogor.

Pekerjaan yang menyambung proyek sebelumnya itu akan dilanjut dari persimpangan Sholis-Yasmin hingga Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor. Sebanyak 90 persen dari proyek itu masuk Kota Bogor dan 10 persen Kabupaten Bogor, dari data MSJ, dana untuk pembebasan lahan menghabiskan Rp 1,5 triliun dengan biaya konstruksi sekitar Rp 1 triliun.

Setelah seksi IIIA rampung, rencana akan langsung berlanjut pada seksi IIIB yang akan dilakukan mulai 2020 hingga 2021. Pengerjaan jalan sepanjang 800 meter itu sepenuhnya dilakukan di atas wilayah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor.

Direktur Operasi II PT PP Muhammad Toha Fauzi mengatakan, jika dilihat dari data yang telah diterima, proses konstruksi tersebut sebenarnya sudah diperiksa oleh semua pihak. Oleh karena itu, pihaknya mengklaim, konstruksi Tol BORR sebenarnya sudah sangat aman.

Kendati demikian, pihaknya masih akan menunggu hasil dari temuan Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) terkait pemicu insiden pada pagi hari. "Kita terbuka, jadi silakan saja, boleh diperiksa. Kita juga sudah periksa dari semua dokumen dan sudah sesuai SOP," kata Toha.

Anggota Komite K2 Kementerian PUPR Lazuardi Nurdin mengatakan, pihaknya harus melakukan investigasi terlebih dahulu untuk mendapatkan kesimpulan penyebab ambruknya kepala tiang pancar.

Judul	Labuan Bajo akan Jadi Destinasi Wisata Premium	Tanggal	Kamis, 11 Juli 2019
Media	Media Indonesia (Halaman 2)		
Resume	Presiden Joko Widodo menyatakan segmentasi pariwisata di Labuan Bajo, NTB, akan difokuskan untuk kelas premium.		



PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA: Presiden Joko Widodo berpose dengan latar belakang keindahan panorama Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, kemarin. Kunjungan Presiden Jokowi tersebut dalam rangka pengembangan potensi pariwisata di daerah.

Labuan Bajo akan Jadi Destinasi Wisata Premium

PRESIDEN Joko Widodo menyatakan segmentasi pariwisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, akan difokuskan untuk kelas premium. Karena itu, penataan kawasan tersebut menjadi sangat penting.

"Seperti ini, kita buat trotoar yang bagus sampai ke ujung dermaga marina Labuan Bajo sehingga turis bisa jalan ke sini sambil menikmati pemandangan," kata Jokowi saat berkunjung ke Labuan Bajo, kemarin.

Pemerintah juga akan membenahi sejumlah fasilitas di tempat tersebut, antara lain pemba-

ngunan Bandara Komodo sebagai bandara internasional yang sejajar dengan bandara di negara lain.

Menurut Jokowi, landasan pacu pesawat akan diperpanjang. "Maksimal tahun depan sudah dilakukan dan bisa digunakan. Spot terminal juga dibuat lebih bagus," ujarnya.

Harapannya ialah pengelola mampu mendatangkan wisatawan ke Labuan Bajo sehingga dapat meningkatkan devisa.

Selain itu, kekurangan sarana air bersih yang kerap menghantui warga akan diatasi.

"Untuk kerajinan, harus dikemas sedemikian apik sehingga menjadi hal yang menarik," tambahnya.

Selain itu, Jokowi menyatakan pembangunan pariwisata Labuan Bajo ialah bukti dari janjinya, yakni membuat sepuluh destinasi unggulan di Tanah Air. "Ya, kita kan sudah merencanakan dua tahun lalu. Kita ingin ada sepuluh destinasi baru dan tempat yang ingin kita prioritaskan salah satunya ialah Labuan Bajo," ucap Jokowi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang mendam-

pingi Presiden mengatakan Kemenhub kini memang tengah fokus menyiapkan infrastruktur transportasi.

"Insya Allah pertengahan tahun depan runway Bandara Komodo sudah 2.450 meter. Artinya, pesawat Airbus 320 bisa landing. Selain itu, ada peningkatan dari kapasitas penumpang yang kita harapkan lebih dari 3,5 juta," terangnya.

BOP dihentikan

Di sisi lain, Presiden mengatakan akan menghentikan Badan Otoritas Pariwisata (BOP) Labu-

an Bajo Flores. "Kalau masyarakat *nolak, nggak mau*, ya setop. Setop sudah. Saya sampaikan setop. Saya ikuti kemauan rakyat. Sudah, karena di sini juga ada bupati, ada gubernur," kata Jokowi saat meninjau lokasi wisata Puncak Waringin.

Ditambahkannya, kewenangan yang ada di BOP Labuan Bajo selanjutnya diberikan kepada pemerintah daerah melalui gubernur dan bupati.

Presiden dan rombongan selanjutnya direncanakan mengunjungi Pulau Rinca di Labuan Bajo. (JL/Aiw/Ant/X-11)

Judul	Berita Foto	Tanggal	Kamis, 11 Juli 2019
Media	Media Indonesia (Halaman 8)		
Resume	Sejumlah pekerja membersihkan material di lokasi ambruknya salah satu tiang penyangga proyek Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) Seksi III A Simpang Yasmin-Semplak di jalan KH Sholeh Iskandar, kemarin.		



ANTARAJARIF FIRMANSYAH

TIANG PENYANGGA PROYEK TOL AMBRUK: Sejumlah pekerja membersihkan material di lokasi ambruknya salah satu tiang penyangga proyek Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) Seksi IIIA Simpang Yasmin-Semplak di Jalan KH Sholeh Iskandar, Cibadak, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, kemarin. Tiang penyangga Tol BORR Seksi IIIA tersebut ambruk karena tidak kuat menahan beban adukan semen yang masih basah dan mengakibatkan dua pekerja luka ringan.

Judul	Berita Foto	Tanggal	Kamis, 11 Juli 2019
Media	Media Indonesia (Halaman 13)		
Resume	Kementerian PUPR akan melakukan sinergi bersama pemangku kepentingan terkait untuk percepatan sertifikasi secara masif sebanyak 212.000 pekerja konstruksi di 2019.		



ANTARA/YULIUS SATRIA WIJAYA

SERTIFIKASI PEKERJA KONSTRUKSI: Pekerja menyelesaikan pembangunan konstruksi gedung di Depok, Jawa Barat, kemarin. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) akan melakukan sinergi bersama pemangku kepentingan terkait untuk percepatan sertifikasi secara masif sebanyak 212.000 pekerja konstruksi di 2019.

Judul	Konsep "Forest City" Jadi Acuan	Tanggal	Kamis, 11 Juli 2019
Media	Kompas (Halaman 10)		
Resume	Ibukota baru yang akan dibangun di Kalimantan memakai konsep forest city. Kota itu dirancang untuk menampung sekitar 1,5 juta orang dan menjadi pusat pertumbuhan baru.		

Konsep "Forest City" Jadi Acuan

Ibu kota baru yang akan dibangun di Kalimantan memakai konsep *forest city*. Kota itu dirancang untuk menampung sekitar 1,5 juta orang dan menjadi pusat pertumbuhan baru.

JAKARTA, KOMPAS — Ibu kota baru yang akan dibangun di Pulau Kalimantan akan memakai konsep *forest city*. Luas hutan lindung di Kalimantan tak akan berkurang.

Hal itu diutarakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro dalam Diskusi FMB9 bertajuk "Pindah Ibu Kota Negara: Belajar dari Pengalaman Negara Sahabat" di Jakarta, Rabu (10/7/2019). Narasumber lain yakni Duta Besar Brasil untuk Indonesia Rubem Barbosa dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Brasil 2010-2014, Sudaryomo Hartosudarmo.

"Pembangunan ibu kota baru tidak akan mengurangi luas hutan lindung. Hutan dijaga. Kami menyadari banyak yang tadinya hutan jadi kelapa sawit. Di Bukit Soeharto yang tak hutan lagi harus direvitalisasi hutannya. Itu mengarah *forest city*," kata Bambang.

Pemindahan ibu kota bertujuan mengurangi ketimpangan ekonomi dan beban Jawa yang

terlalu berat. Sekitar 58 persen warga Indonesia tinggal di Jawa, sementara rata-rata pulau lain dihuni kurang dari 10 persen populasi Indonesia, kecuali Sumatera. Jawa berkontribusi 58,49 persen PDB dan area sekitar Jakarta berkontribusi 20,85 persen dari PDB.

Ketimpangan ekonomi

Soal ketimpangan ekonomi juga jadi alasan Brasil memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Beda dengan Indonesia yang berbentuk kepulauan. Brasil negara daratan. Tingginya ketimpangan ekonomi antara Rio de Janeiro, ibu kota lama, dan pedalaman Amazon mendorong pemindahan ibu kota. Brasilia jadi kota terbesar ketiga Brasil.

Dirancang untuk dihuni 1 juta orang, kini penduduk Brasilia 3,3 juta orang. "Brasilia berkembang. Di sekitar Brasilia ada 20 kota satelit kecil yang tumbuh industri, perdagangan, dan pariwisatanya," kata Sudaryomo.

"Kami membangun dari nol. Tak ada apa-apa di daerah itu,

bahkan tak ada infrastruktur. Kami harus membangun jalan, rel kereta api," ujar Barbosa. Jarak Brasilia dari Rio de Janeiro 1.200 kilometer. Ketimpangan pedalaman Amazon dan Rio de Janeiro berkurang. Berbeda dengan calon ibu kota baru Indonesia di area banyak hutan, Brasilia didirikan di daerah kering, ketinggian sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut.

Bambang menegaskan, ibu kota baru diutamakan sebagai pusat pemerintahan dan harus berpusat Indonesia. "Kita ingin ibu kota baru Indonesia didesain, dipikirkan, dan dipilih bangsa sendiri. Jakarta didesain dan dibangun pemerintah kolonial, VOC dan Hindia Belanda. Harus menjadi kota ideal yang *livable* (nyaman dihuni), kita ingin perkembangan kota terkendali," ujarnya.

Ibu kota baru dirancang untuk dihuni 1,5 juta jiwa. Dari biaya Rp 466 triliun untuk pemindahan ibu kota, biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditekan seminimal mungkin. (ISW/BOW)



Acara diskusi bertajuk "Pindah Ibu Kota Negara: Belajar dari Pengalaman Negara Sahabat" berlangsung di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, Rabu (10/7/2019). Berbicara dalam diskusi itu (dari kiri ke kanan) Duta Besar Brasil untuk Indonesia Rubem Barbosa, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Brasil 2010-2014, Sudaryomo Hartosudarmo.

Judul	Berita Foto	Tanggal	Kamis, 11 Juli 2019
Media	Kompas (Halaman 11)		
Resume	Pemerintah Provinsi NTT sedang membangun infrastruktur di Sumba Timur untuk mengurangi daerah terisolasi di pesisir selatan.		

Pembangunan Infrastruktur di Sumba Timur



KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Alat berat dioperasikan untuk memperlebar jalan yang menghubungkan Kecamatan Tabundung dengan Kecamatan Pinupahar yang berada di pesisir selatan Sumba Timur, Rabu (10/7/2019). Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sedang membangun infrastruktur di Sumba Timur untuk mengurangi daerah terisolasi di pesisir selatan.

Judul	Kendala Tol di Kaltim Teratasi	Tanggal	Kamis, 11 Juli 2019
Media	Kompas (Halaman 15)		
Resume	Proyek Tol Balikpapan-Samarinda ditargetkan beroperasi secara fungsional pada akhir 2019.		

Kendala Tol di Kaltim Teratasi

Proyek Tol Balikpapan-Samarinda ditargetkan beroperasi secara fungsional pada akhir 2019. Beberapa kendala seperti pembebasan lahan dan geoteknik lahan mulai tertangani.

BALIKPAPAN, KOMPAS — Pembebasan lahan dan kondisi tanah menjadi kendala pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda di Kalimantan Timur. Kendati beberapa kali meleset dari prediksi, jalan tol pertama di Kalimantan ditargetkan akan beroperasi secara fungsional pada akhir tahun 2019.

Proyek Tol Balikpapan-Samarinda terbagi menjadi lima seksi dengan total panjang 99,35 kilometer. Total investasi proyek Rp 9,97 triliun, yang bersumber dari APBN, APBD, dan pinjaman asing.

Jalan tol ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang disebut pemerintah pada tahun ini selain tiga ruas tol di Tol Lingkar Luar Jakarta 2, Jakarta-Cikampek layang, Pandaan-Malang, dan Manado-Bitung. Jika seluruh proyek itu terealisasi, akan menambah 245 kilometer jalan tol baru sampai akhir tahun ini (*Kompas*, 7/5/2019).

Berdasarkan data hingga 27 Juni, lahan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang belum dibebaskan tinggal 1,04 persen dari total kebutuhan lahan seluas 789,29 hektar. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Seksi 5 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XII Dodi Tunjung mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi dengan PPK Lahan, masih ada permintaan pembebasan tanah sisa sebanyak 34 bidang di seksi V. Setelah pembebasan lahan selesai, PPK Pembangunan baru bisa melaksanakan proyek di bidang-bidang lahan tersebut.

"Pembebasan lahan masih dalam proses, begitu juga dengan pengerjaan tol. Seksi V terbagi menjadi dua, seksi V sepanjang 9,85 kilometer dan seksi V (A) sepanjang 1,65 kilometer. Seksi V pengerjaannya mencapai 92 persen, sedangkan



Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda di Kalimantan Timur sepanjang 99,35 kilometer, hingga akhir Juni 2019, sudah mencapai 91 persen. Jalan tol ini ditargetkan selesai dibangun pada November 2019. Foto diambil pada Rabu (10/7/2019).

seksi V (A) perkembangannya sudah 50 persen," kata Dodi di Balikpapan, Rabu (10/7/2019).

Ruas tol seksi V memanjang dari Kilometer 13 sampai Bandara Sepinggang, Balikpapan. Menurut Dodi, kendala lain yang dihadapi adalah terjadinya longsor pada awal tahun di lahan yang sudah ditimbun.

Pembangunan juga sempat terkendala saat bencana tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, pada November 2018. Karena, kebutuhan batu dipasok dari Sulawesi. Kondisi

ini mengakibatkan suplai batu terhenti selama dua bulan sehingga target selesai April 2019 tidak tercapai.

Sementara PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda (JBS) menangani seksi II, III, dan IV sepanjang 66 kilometer dari Samboja hingga Samarinda. Direktur Teknik dan Operasi PT JBS Edy Nugraha mengatakan, total pengerjaan di seksi II hingga IV sudah 91 persen.

Kendala yang dihadapi selama ini adalah persoalan geoteknik. Hal itu mencakup per-

soalan keadaan tanah di beberapa titik yang tidak sesuai prediksi awal. Diprediksi proyek selesai September 2019.

"Sebagai contoh, konstruksi yang semula direncanakan menggunakan perkuatan *mini pile*, *geotextile*, dan urukan tanah, ternyata setelah dievaluasi ulang, harus diganti dengan *pile slab* (tiang pancang)," ujar Edy.

Pembangunan jalan tol ini juga beririsan dengan wilayah konservasi Taman Hutan Rakyat (Tahura) Bukit Soeharto. Sebelumnya, pembebasan la-

han sempat terkendala karena masyarakat yang tinggal di sana meminta ganti tanaman.

"Saat ini masalah sudah selesai. Tahura itu dibentuk tahun 2016 dan masyarakat sudah banyak sekali di dalam. Tugas kami mengawasi tahura agar tidak terjadi perambahan ilegal," kata Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah Tahura Rusmadi.

Jalan tol tersebut diharapkan akan mengurangi biaya logistik dan mengurangi waktu tempuh antardua kota besar di Kalimantan Timur. (CIP)

Judul	Kawasan Labuan Bajo Terus Ditata	Tanggal	Kamis, 11 Juli 2019
Media	Kompas (Halaman 16)		
Resume	Pemerintah pusat dan daerah terus menata kawasan Labuan Bajo menjadi kawasan pariwisata terpadu untuk kelas menengah atas.		

Kawasan Labuan Bajo Terus Ditata

Pemerintah pusat dan daerah terus menata kawasan Labuan Bajo menjadi kawasan pariwisata terpadu untuk kelas menengah atas.

LABUAN BAJO, KOMPAS — Kawasan pariwisata strategis Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, terus ditata. Pembangunan sarana penunjang dipercepat demi menggenjot kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo yang dirancang menjadi destinasi wisata bagi kelas menengah atas.

Salah satu sarana penunjang yang menjadi prioritas penataan adalah Bandara Komodo di Labuan Bajo. Pemerintah memutuskan untuk menambah landas pacu Bandara Komodo yang kini sepanjang 2.250 meter menjadi 2.450 meter. Selain itu, pemerintah juga memperluas terminal domestik serta membangun terminal internasional 5.538 meter persegi dan terminal kargo 2.860 meter.

Presiden Joko Widodo saat meninjau kawasan wisata Labuan Bajo, Rabu (10/7/2019), mengatakan, pembangunan bandara ditargetkan rampung pada tahun 2020.

"Yang ingin kami percepat, pertama, bandara. Terminal kami besarkan, landas pacu diperpanjang. Maksimal tahun depan semuanya sudah rampung," ujar Presiden.

Hari Rabu, Presiden Jokowi bersama Nyonya Iriana melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Manggarai Barat. Tujuan utama kunjungan kerja adalah meninjau kemajuan penataan kawasan wisata Labuan Bajo. Selain bandara, kawasan Puncak Waringin dan kawasan Marina Terpadu juga dikunjungi Presiden begitu tiba di Labuan Bajo.

Menurut rencana, yang akan dibangun tidak hanya bandara, tetapi juga sarana penunjang lain. Salah satunya jalan khusus untuk pejalan kaki yang disiapkan di sepanjang jalan di Labuan Bajo.

"Mulai tahun ini kami akan



Presiden Joko Widodo meninjau kawasan wisata strategis Labuan Bajo dari Puncak Waringin di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu (10/7/2019). Pemerintah mempercepat penataan kawasan Labuan Bajo yang dirancang menjadi destinasi wisata bagi kalangan kelas menengah ke atas.

bangun trotoar sampai ke ujung sehingga turis bisa menikmati pemandangan laut yang ada di depan sana," ujar Presiden Jokowi saat menjajal jalur pedestrian di Jalan Soekarno-Hatta, Labuan Bajo.

Sarana penyedia air bersih tak luput dari penataan. Begitu pula sarana jalan yang rencananya akan diperlebar. Saat ini pemerintah masih memetakan jalan mana saja yang bisa diperlebar untuk memudahkan transportasi.

Pemerintah juga berencana memindah pelabuhan barang ke lokasi lain. Presiden Jokowi menyampaikan, pelabuhan di Labuan Bajo hanya diperuntukkan bagi kapal-kapal penumpang untuk mengangkut para wisatawan.

Saat ini PT ASDP Indonesia Ferry, salah satu badan usaha milik negara (BUMN), tengah membangun Kawasan Terpa-

du Marina Labuan Bajo. Kepada Presiden Jokowi, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Ira Puspawati menjelaskan, Kawasan Terpadu Marina dirancang menjadi kawasan terintegrasi wisata baru. Kawasan itu terdiri dari hotel, marina atau pelabuhan khusus kapal pesiar, dan arena komersial.

"Ke depan akan ada 180 kamar hotel. Di depan kita persis bisa parkir 80 kapal. Insya Allah selesai Desember tahun ini. Kemudian marina bulan Juni 2020," kata Ira.

Kelas menengah atas

Kawasan Labuan Bajo, kata Presiden, ditargetkan menjadi destinasi bagi wisatawan kelas menengah atas. "Segmentasi di sini kami mau ambil yang berbeda, yakni segmentasinya premium," ujarnya.

Oleh karena itu, Gubernur NTT Viktor Laiskodat akan menyesuaikan kebijakan daerah agar bisa menunjang pariwisata dengan segmen kelas menengah atas. Salah satunya dengan mengeluarkan izin bagi pembangunan hotel bintang dua ke atas.

"Presiden mengatakan bahwa NTT itu dikhususkan untuk *middle class* sampai *deluxe tourism*. Karena itu, pengusaha hanya bisa membangun hotel bintang 3, 4, dan 5. Pembangunan hotel bintang 1 dan melati tidak boleh. Pembangunan itu kita turunkan ke rakyat langsung," kata Viktor.

Pemerintah daerah akan menyiapkan masyarakat agar lebih sadar wisata. Masyarakat akan diberi semacam pelatihan untuk wisata berbasis masyarakat. Rumah-rumah warga bisa disiapkan untuk menampung wisatawan. (NTA)

Judul	Berita Foto	Tanggal	Kamis, 11 Juli 2019
Media	Koran Tempo (Halaman 6)		
Resume	Presiden Joko Widodo meninjau Puncak Waringin saat melakukan kunjungan kerja di Labuan Bajo, NTT, kemarin.		

TEMPO/SUBEKTI



Labuan Bajo. Presiden Joko Widodo meninjau Puncak Waringin saat melakukan kunjungan kerja di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, kemarin. Labuan Bajo merupakan salah satu destinasi pariwisata baru yang menjadi prioritas pemerintah seperti pada Pulau Rinca dan Gua Batu Cermin.

Judul	Jasa Marga Siap Terapkan Satu Arah di Jalan Tol Cikampek	Tanggal	Kamis, 11 Juli 2019
Media	Koran Tempo (Halaman 20)		
Resume	PT Jasa Marga siap menerapkan sistem satu arah di jalan tol Jakarta-Cikampek jika kepadatan lalu lintas benar-benar terjadi.		

Jasa Marga Siap Terapkan Sistem Satu Arah di Jalan Tol Cikampek

"Hanya dilakukan jika terjadi kepadatan saat *window time*."



PT Jasa Marga menutup beberapa ruas jalan untuk perawatan jalan tol Jakarta-Cikampek di Kilometer 26.

Francisco Rosarians
francisco@tempo.co.id

JAKARTA — PT Jasa Marga siap menerapkan sistem satu arah (*contraflow*) di jalan tol Jakarta-Cikampek jika kepadatan lalu lintas benar-benar terjadi. Langkah ini diambil untuk mengatasi penumpukan kendaraan di titik tertentu akibat adanya pengerjaan proyek.

Kepala Departemen Komunikasi PT Jasa Marga, Irra Susiyanti, mengatakan salah satu penyebab kemacetan di jalan tol Jakarta-Cikampek adalah proyek pemeliharaan yang digarap sejak 30 Juni lalu. Dalam pemeliharaan ini, Jasa Marga membongkar permukaan jalan untuk diganti dengan aspal baru.

Irra mencontohkan, pekan ini perawatan jalan dilakukan di Kilometer 26-225 hingga Kilometer

"(Jalan tol layang) sudah selesai 86 persen. Ditargetkan selesai konstruksinya pada akhir September 2019."

Djoko Dwijono

Direktur Utama PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek

26+400. Pengerjaan dilakukan sejak 7 Juli pukul 10.00 hingga 11 Juli pukul 05.00.

Mitigasi risiko pengaturan lalu lintas berupa pelaksanaan buka-tutup di Jalur I. Serta *contraflow* dari Kilometer 25+100 hingga Kilometer 29+500," kata Irra, kemarin. "Hanya dilakukan jika terjadi kepadatan saat *window time*, pukul 22.00-05.00 WIB."

Irra mengatakan Jasa Marga tetap harus melakukan perawatan meski saat

ini ada pengerjaan tiga proyek infrastruktur nasional di jalan tol Cikampek. Sebab, perawatan ini dilakukan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan pengguna jalan berbayar tersebut. Untuk itu, Jasa Marga telah berkoordinasi dengan manajemen konstruksi tiga proyek lain agar jadwal pengerjaan tidak berbenturan. "(Pengemudi) hindari titik lokasi pekerjaan dengan mengambil jalur alternatif lainnya," ujar Irra.

Kemacetan di jalan tol Cikampek belakangan ini semakin dikeluhkan masyarakat. Berdasarkan pemantauan tim *Tempo*, kemacetan sudah terjadi sejak Kilometer 6 atau sekitar Gerbang Tol Jatibening. Kemacetan pada titik ini memuncak di Simpang Susun Cikunir yang mempermudah kendaraan dari Cawang dengan kendaraan dari jalan tol Jagorawi dan kendaraan besar dari jalan tol Lingkar Luar Jakarta. Kepadatan kendaraan berlanjut hingga Kilometer 16 atau Gerbang Tol Bekasi Timur.

Kemacetan yang terjadi antara Gerbang Tol Cibitung dan Gerbang Tol Cikarang Utara disebabkan pengerjaan perawatan jalan yang digarap PT Jasa Marga. Adapun kemacetan di jalan antara Gerbang Tol Cikarang Timur dan Kawarang Timur disebabkan penuntasan pembangunan

konstruksi jalan tol layang.

"(Jalan tol layang) sudah selesai 86 persen. Ditargetkan selesai konstruksinya pada akhir September 2019," kata Direktur Utama PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek, Djoko Dwijono, akhir Juni lalu.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Bambang Prihartono, menilai Jasa Marga memang harus menerapkan sistem *contraflow* pada titik-titik kemacetan di jalan tol Cikampek. Pola ini telah terbukti berhasil mengurangi kemacetan pada saat arus mudik dan balik Lebaran lalu.

Menurut Bambang, kebijakan ini bisa dilakukan saat kendaraan pribadi dan transportasi umum ha-

rus masuk ke jalan tol bersamaan dengan perjalanan truk atau kontainer besar. "Karena masuknya bersamaan pasti semakin padat dan macet total," kata Bambang.

Kepala Teknik Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Johan Budi Gunawan, meminta agar PT Jasa Marga tidak lagi memberikan imbauan kepada pengguna jalan tol untuk berpindah ke jalur alternatif. Sebab, imbauan itu justru menambah beban jalan arteri yang sebagian besar berada di Kota Bekasi. "Jalan Kalmalang ikut mengalami kemacetan parah kemudian menular ke jalan-jalan lain di Kota Bekasi," kata dia.

● ADI WARSONO

Antara Jakarta dan Cikampek

Kemacetan di jalan tol Jakarta-Cikampek mencuat sejak akhir pekan lalu. Jalan berbayar sepanjang 73 kilometer ini tengah menanggung beban dari empat pekejaan konstruksi yang memakan sebagian besar badan jalannya. Kendaraan yang melintas, termasuk kendaraan berat, tak mampu ditampung jalan tol tersebut.

Proyek

1. Pembangunan jalur kereta *light rail transit* (LRT) Cawang, Jakarta Timur-Jatimulya, Jawa Barat
2. Pembangunan jalan tol layang Jakarta-Cikampek
3. Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung
4. Perawatan rutin jalan tol Jakarta-Cikampek

Profil Tol Jakarta-Cikampek

Penggunaan : sejak 1988
Panjang : 73 kilometer
Jumlah lajur :

1. Jakarta-Cikarang Utara : 4 lajur x 2
2. Cikarang Utara-Cikarang Barat : 3 lajur x 2
3. Cikarang Barat-Cikarang Timur : 4 lajur x 2
4. Cikarang Timur-Cikampek : 3 lajur x 2

Tempat Istirahat:

1. Sisi Utara : 5 titik
2. Sisi Selatan : 4 titik

Gerbang Jalan Tol:

1. Pintu jalan tol : 18 titik
2. Interchange : 3 titik (Cawang, Cikunir, dan Dawuan)

Simpang Susun:

1. Cawang
2. Cikunir
3. Dawuan
4. Cikampek

Judul	Berita Foto	Tanggal	Kamis, 11 Juli 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 1)		
Resume	Pemerintah berencana mempercepat pembangunan bandara di Labuan Bajo sesuai dengan rencana untuk menjadi bagian dari 10 Bali Baru.		

► PENATAAN LABUAN BAJO



Setkab/Rahmat

Presiden Joko Widodo (*tengah*) berdiskusi tentang penataan Labuan Bajo, NTT, dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (*kiri*), Gubernur NTT Viktor Laiskodat (*kedua kiri*) serta

pejabat terkait saat mengunjungi daerah wisata tersebut, Rabu (10/7). Pemerintah berencana mempercepat pembangunan bandara di Labuan Bajo sesuai dengan rencana untuk menjadi bagian dari 10 Bali Baru.

Judul	Berita Foto	Tanggal	Kamis, 11 Juli 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Penyelesaian tol Kunciran-Bandara terus dikebut dengan target merampungkan pembebasan lahan hingga akhir Juli 2019.		

► PEMBANGUNAN TOL BANDARA



Bisnis/Felix Jody Kinarwan

Pekerja menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Kunciran-Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (10/7). Penyelesaian tol Kunciran-Bandara terus

dikebut dengan target merampungkan pembebasan lahan hingga akhir Juli 2019. Progres pembangunan sendiri sudah mencapai 47%.

Judul	Lagi-Lagi Ambruk di Proyek Tol	Tanggal	Kamis, 11 Juli 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Tidak dipungkiri, proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia berjalan secara masif, salah satunya adalah pembangunan jalan tol.		

► KECELAKAAN KERJA

Lagi-Lagi Ambruk di Proyek Tol

Tidak dipungkiri, proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia berjalan secara masif, salah satunya adalah pembangunan jalan tol.

Krizia P. Kinanti
krizia.putri@bisnis.com

Jalan tol menjadi salah satu proyek pembangunan yang paling masif dilakukan dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam targetnya, setidaknya ada 1.800 km jalan tol baru yang ingin diselesaikan hingga akhir 2019.

Masihnya pembangunan proyek jalan tol ini sangat memungkinkan diwarnai dengan adanya insiden-insiden kecelakaan kerja. Dari 2018 hingga saat ini sudah terjadi sejumlah kecelakaan kerja di proyek jalan tol berbagai tersebut.

Apabila dirunut, pada tahun 2018 terdapat insiden ambruknya girder jalan tol Depok-Antasari, juga terjadi ambruknya konstruksi tiang LRT di Pulogadung. Dilanjutkan dengan insiden ambruknya crane proyek pembangunan rel dwiganda di Jatinegara, serta ambruknya tembok *underpass* di Jalan Perimeter Soekarno Hatta serta runtuhnya tiang girder di proyek tol Becakayu.

Memasuki 2019, terdapat insiden jatuhnya besi *hollow* pada proyek jalan tol Cimanggis-Cibitung.

Dini hari kemarin, terulang kembali kecelakaan kerja di proyek jalan tol, saat ambruknya tiang penyangga pada pro-

► **BPJT juga akan lebih mengaktifkan konsultan PMI (Pengendali Mutu Independen) untuk memastikan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.**

yek jalan tol Bogor Ring Road (BORR) seksi IIIA, tepatnya di Jalan Soleh Iskandar, Kayu Manis, Tanah Sareal.

Direktur Utama PT Marga Sarana Jabar (MSJ) selaku anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk, yang mengoperasikan Jalan Tol BORR, Hendro Atmodjo menjelaskan bahwa bekisting ambruk pada pukul 05.15 WIB saat dilakukan pengecoran *pier head*.

Dia menambahkan, pihaknya sudah memeriksa lendutan beton dan pengecoran bisa dilanjutkan. Namun, saat dilakukan pengecoran di *pier head* (pilar) 109, bekisting ambruk.

"Totalnya ada 25 truk *mixer*, saat pengecoran ke 22 terjadi ketidakkuatan dari balok penyangga sehingga beton di dalam *pier head* tumpah ke jalan arteri," jelas Hendro, Rabu (10/7/2019).

Sejauh ini, kejadian ambruknya bekisting tidak menimbulkan korban jiwa. Sebanyak dua orang mengalami luka ringan dan telah mendapat perawatan di RS Hermina.

Hendro mengimbuahkan, MSJ sempat menghentikan sementara pekerjaan konstruksi di seksi III (Simpang Yasmin-Salabenda). Pekerjaan konstruksi digarap oleh PT PP (Persero) dan konsultan PT Indec KSO.

Pihaknya juga bekerja sama dengan Kepolisian sempat melakukan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan kendaraan yang menuju arah Parung dialihkan ke Simpang Yasmin lalu ke Simpang Semplak/Atang Sanjaya, begitupun sebaliknya.

Direktur Teknik dan Operasi PT Marga Sarana Jabar (MSJ) Alfandra menambahkan bahwa saat itu terdapat 57 *pier head* yang harus dilaku-

kan pengecoran, dan yang ambruk adalah *pier head* ke 10, yang mana pada *pier head* 1, *pier head* dengan metode dan prosedur standar operasi (SOP) yang sama, semua tidak ada masalah. Namun, tiba-tiba ambruk.

Pihaknya bersama dengan PT PP akan mencari tahu lebih lanjut penyebab pastinya tol BORR Seksi IIIA ini, dugaan sementara adalah penurunan performa penyangga besi.

"Kalau saya lebih curiga ke penyangga besi yang performanya sudah turun, setelah nanti tahu penyebabnya apa, kami baru bisa memutuskan apakah akan mengganti metode dan SOP-nya," katanya kepada *Bisnis*, Rabu (10/7).

Sebagai informasi, konstruksi seksi III tol BORR ini sudah dimulai sejak 21 Desember 2018 lalu dan akan selesai pada tahun ini.

Secara keseluruhan, Jalan Tol BORR dibagi menjadi empat seksi, yakni Seksi I (Sentul Selatan-Kedung Halang) sepanjang 3,85 km telah beroperasi sejak November 2009, Seksi IIA (Kedung Halang-Kedung Badak) sepanjang 1,95 km telah beroperasi sejak Mei 2014, dan Seksi IIB (Kedung Badak-Simpang Yasmin) sepanjang 2,65 km telah beroperasi Juni 2018.

Sementara itu, seksi III meliputi Simpang Yasmin-Salabenda sepanjang 2,85 kilometer yang akan dikerjakan bertahap, sementara sisanya yakni seksi IIIB.

Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) akan memeriksa kepatuhan kontraktor dan badan usaha jalan tol (BUJT) dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) seiring peristiwa ambruknya bekisting di proyek jalan tol Bogor Outer Ring Road (BORR).

INVESTIGASI

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan bahwa Kemi-



terian PUPR telah meminta BUJT dan kontraktor pelaksana untuk segera melakukan penyusunan langkah-langkah pengendalian dan terus berupaya dalam meningkatkan pengawasan pelaksanaan metode kerja dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang ada.

Bina Marga juga telah menerbitkan tim Komisi Keamanan Icmabatan dan Terowongan Jalan (KKITJ) untuk meninjau dan membahas secara langsung ke lokasi proyek Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi 3A (Simpang Yasmin- Simpang Semplak).

"BPJT juga memerintahkan seluruh BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) dan kontraktor pelak-

sana untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PKT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum," ujarnya.

BPJT juga akan lebih mengaktifkan konsultan PMI (Pengendali Mutu Independen) untuk memastikan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi. Pengawasan internal dari BUJT pada kontraktor pelaksana juga harus terus dilakukan secara lebih ketat dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi jalan tol

guna menghindari berulangnya kejadian yang serupa.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pentingnya keselamatan konstruksi dalam membangun dan menjaga kredibilitas, baik sebagai seorang *engineer*, pelaksana maupun penyedia jasa. "Pemerintah terus meningkatkan kedisiplinan masyarakat jasa konstruksi melaksanakan ketentuan K3 Konstruksi," ujar Basuki.

Kecelakaan kerja tak hanya menyebabkan kematian, kerugian materi, moril dan pencemaran lingkungan, namun juga dapat mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. (Rivvi Maulana) E

Judul	Berita Foto	Tanggal	Kamis, 11 Juli 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Pekerja mengoperasikan ekskavator untuk melakukan pengerukan lumpur di Waduk Pluit, Jakarta, Selasa.		

► Pengerukan Lumpur Waduk Pluit



Antara/M Risyaf Hidayat

Pekerja mengoperasikan ekskavator untuk melakukan pengerukan lumpur di Waduk Pluit, Jakarta, Selasa (9/7). Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengoperasikan sekitar 13 ekskavator dalam pengerukan, sehingga waduk tersebut dapat menampung air hingga setinggi tiga meter ketika musim penghujan.

Judul	27 Lapak Liar di GT Surgem Dipindah	Tanggal	Kamis, 11 Juli 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Jasa Marga Cabang Surababay-Gempol bersama pihak berwenang lainnya menertibkan sebanyak 27 bangunan lapak liar di akses keluar Gerbang Tol Banyu Urip Jalan Tol Surabaya-Gempol pada Km 5+600.		

► PENERTIBAN JALAN

27 Lapak Liar di GT Surgem Dipindah

Bisnis, JAKARTA — Jasa Marga Cabang Surabaya-Gempol (Surgem) bersama pihak berwenang lainnya menertibkan sebanyak 27 bangunan lapak liar di akses keluar Gerbang Tol (GT) Banyu Urip Jalan Tol Surabaya-Gempol pada Km 5+600.

Operasi penertiban lapak liar dipimpin langsung oleh Kapolsek Sukomanunggal Kumpul Mulyono. Penertiban yang juga dihadiri oleh Camat Sukomanunggal La Koli, dilakukan untuk mencegah potensi lapak liar yang berjarak 8 meter dari Off Ramp GT Banyu Urip ini menjadi bangunan permanen.

“Jadi harus dibongkar sekarang. Jika terus dibiarkan, nantinya menjadi permanen dan semakin mengganggu kenyamanan masyarakat dan juga kemungkinan membahayakan pengendara,” ujar Kapolsek Sukomanunggal Mulyono dalam rilisnya Rabu (10/7).

Operation Department Head Jasa Marga Cabang Surabaya-Gempol

Amat Basuni mengatakan bahwa sebelumnya di awal tahun 2018, lapak liar ini telah dibongkar.

“Di awal tahun 2018 lalu sudah dibongkar. Namun sekitar September 2018 mulai dibangun lagi sehingga di akhir tahun lalu kami langsung mitigasi pembangunan lapak liar permanen dengan melakukan koordinasi kepada pihak terkait, termasuk pada pemilik lapak,” ujar Amat.

Setelah melakukan pembongkaran, Jasa Marga Cabang Surgem dan instansi terkait akan melakukan pemagaran dan penghijauan serta terus memonitor perkembangan lapak liar di GT Banyu Urip.

Sementara itu, setelah menggelar pekerjaan pemeliharaan di dua titik pada 30 Juni-4 Juli 2019, PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jakarta-Cikampek melakukan pekerjaan serupa di titik berbeda Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada pekan ini.

Irra Susiyanti Corporate Communication Department Head

Jasa Marga mengatakan bahwa hal ini dilakukan guna menjaga dan meningkatkan kenyamanan serta keamanan pengguna Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

“Pada minggu ini, pekerjaan pemeliharaan dilakukan di jalur A (arah Cikampek) pada KM 26+205 s.d KM 26+400 dengan penanganan sepanjang 175 m,” ujarnya.

Pekerjaan pemeliharaan tersebut berlangsung di lajur 2 sepanjang titik tersebut sejak Minggu (7/7) pukul 10.00 WIB hingga Kamis (11/7) pukul 05.00 WIB.

Untuk mengantisipasi kepadatan yang berpotensi terjadi akibat pekerjaan yang akan menutup sebagian lajur pada lokasi tersebut, Jasa Marga bekerja sama dengan Kepolisian telah menyiapkan mitigasi risiko melalui pengaturan lalu lintas berupa pelaksanaan buka tutup lajur 1 serta *contra flow* dari km 25+100 sd km 29+500 saat *window time* (Pk. 22.00 sd Pk.05.00) jika terjadi kepadatan. (Krizia P. Kinanti)

Judul	RUU Pertanahan Tuntas September	Tanggal	Kamis, 11 Juli 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 23)		
Resume	Rancangan RUU Pertanahan yang masuk dalam program Legislasi Nasional ditargetkan tuntas pada September 2019.		

► ATURAN LAHAN

RUU Pertanahan Tuntas September

Bisnis, JAKARTA — Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) ditargetkan tuntas pada September 2019.

Wakil Ketua Komisi II DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pertanahan, Herman Khaeron mengklaim pihaknya sudah menyelesaikan 5 bab dari 15 bab yang harus dibahas. "Secara substansi ada di 5 bab yang selesai ini, hampir separuh pasal sudah diselesaikan," kata Herman di Jakarta, Rabu (10/7).

Dia menegaskan, RUU ini sangat bermanfaat untuk memberikan sebuah kepastian terkait lahan bagi semua pihak guna menghindari terjadinya konflik.

Apabila RUU Pertanahan ini sudah disahkan maka peraturan ini akan menjadi UU yang dapat digunakan seluruh Kementerian/Lembaga yang mengurus tentang lahan. "Ini bukan undang-undangnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional [ATR/BPN] tetapi ini UU Republik Indonesia yang tentu akan digunakan oleh kewenangannya sektor lain," ujarnya.

Pembahasan RUU Pertanahan sudah dilakukan sejak tahun 2012, beleid baru ini dicanangkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan salah satu substansi yang diatur dalam RUU Pertanahan yaitu terciptanya pendaftaran tanah menuju *single land administration*.

Menurutnya, adanya *single land administration* penting karena selama ini objek pendaftaran tanah yang dilakukan tidak meliputi kawasan hutan, pesisir, pulau-pulau kecil, waduk, hingga kawasan lindung dan konservasi. Dengan demikian, pemetaan kawasan-kawasan tersebut belum terintegrasi dalam sistem informasi pertanahan.

"Adanya sistem informasi pertanahan yang terintegrasi akan memudahkan pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pelaku usaha, masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal," kata Sofyan.

Sofyan Djalil memastikan aturan *single land administration system* atau SLAS yang diatur dalam aturan tersebut diatur guna mengintegrasikan kebijakan terkait lahan secara optimal. "Sehingga, kalau kami membuat peta tata batas itu standarnya sama. Jadi masing-masing [kementerian] tetap dengan kewenangannya," katanya.

Sementara itu, pelaku usaha kehutanan sebelumnya meminta pengesahan rancangan undang-

undang (RUU) Pertanahan yang kini masih dibahas di DPR perlu ditinjau kembali, karena dianggap beririsan dengan berbagai kepentingan sektor usaha berbasis lahan seperti industri kehutanan, perkebunan, tambang, dan sebagainya.

Purwadi Soeprihanto, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mengatakan, pembahasan terkait RUU Pertanahan belum melibatkan sektor usaha berbasis lahan secara intensif.

"Pembahasan RUU pertanahan ini belum melibatkan stakeholder terkait [industri berbasis lahan] secara intensif, ini harus dilakukan karena harus dipikirkan dampaknya terhadap dunia usaha," kata Purwadi kepada *Bisnis*, Rabu (10/7).

Dia menambahkan ada empat pasal yang menyinggung terkait kawasan hutan yakni, pasal 23 terkait rencana tata ruang, pasal 63, pasal 64 dan pasal 66 terkait obyek pendaftaran tanah.

Pada pasal 23 disebutkan bahwa kawasan hutan termasuk bagian dari kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang.

Menurutnya, kawasan yang dimaksud dalam RUU tersebut seharusnya hanya membahas terkait kawasan yang berada di luar kawasan hutan, karena kawasan hutan sudah diatur

dalam UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan.

APHI juga tidak setuju dengan bunyi pasal 63 dan pasal 66 yang pada intinya menyatakan bahwa obyek pendaftaran tanah meliputi semua bidang tanah dan kawasan tanah di seluruh wilayah Indonesia perlu didaftarkan.

Menurutnya, jika berpatok pada UU Nomor 41/1999 maka kawasan hutan tidak termasuk obyek pendaftaran tanah.

Selain itu, bunyi pasal 64 yang mewajibkan untuk melakukan penataan batas kembali pada lahan konsesi juga dianggap memberatkan pengusaha karena sebagian besar batas izin konsesi hutan sudah dilakukan penataan batas dan penetapan serta akan diintegrasikan melalui kebijakan satu peta (*one map policy*).

"Kalau ini diulang lagi [penataan batasnya] potensi *high cost economy*, ini yang kami keberatan," lanjutnya.

Menanggapi hal itu, Herman Khaeron mengatakan bahwa kewenangan terkait konsesi kehutanan tetap akan menjadi ranah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan masalah seperti pemetaan ulang wilayah konsesi seperti yang tertuang pada pasal 64 RUU Pertanahan akan tetap diatur sesuai dengan kewenangan KLHK. *(Nur Fatmah ABS)*

Judul	Berita Foto	Tanggal	Kamis, 11 Juli 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 23)		
Resume	Kementerian PUPR akan melakukan sinergi bersama pemangku kepentingan terkait untuk percepatan sertifikasi secara masif sebanyak 212.000 pekerja konstruksi di 2019.		

► **PERCEPATAN SERTIFIKASI**



Antara/Yulis Satria Wijaya

Pekerja menyelesaikan pembangunan konstruksi gedung di Depok, Jawa Barat, Rabu (10/7). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan sinergi bersama para pemangku kepentingan untuk percepatan sertifikasi secara masif sebanyak 212.000 pekerja konstruksi pada tahun ini.